

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

**SEKRETARIAT DAERAH**



**LAPORAN PERKEPERKEMBANGAN  
RENCANA AKSI PEMBERANTASAN  
KORUPSI**

Aksi Transparansi dan Akuntabilitas  
Dalam Mekanisme Pengadaan  
Barang dan Jasa B09—2017

---

# KATA PENGANTAR

---

## Aksi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa B09—2017

Bahwa pada tahun 2016 telah diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan (RAD PPK) Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 (Inpres 10/2016), dimana terdapat fokus aksi RAD PPK Pemerintah Daerah yang diprioritaskan kepada sektor perizinan, keterbukaan informasi, transparansi penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial, serta pengadaan barang dan jasa.

Secara spesifik pelaksanaan butir kelima dari Inpres 10/2016 maka terbitlah surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 356/4429/SJ (SE-Mendagri 356/4429/SJ) tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang mengatur lebih detail tentang detail dan tenggat waktu capaian ukuran keberhasilan dan data dukung yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 telah dilakukan analisis terhadap 143 (seratus empat puluh tiga) permasalahan / isu strategis yang dihasilkan dari analisis Strengths Weaknesses Opportunities Threats (SWOT) yang dibobot berdasarkan Internal Factor Evaluation Matrix (IFE Matrix) dan External Factor Evaluation Matrix (EFE Matrix) penentuan drajat prioritas selanjutnya disusun berdasarkan derajat penyelesaian prioritas yang mulai dari menengah hingga tinggi. Selanjutnya berdasarkan hasil analisa tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Organisasi Perangkat Daerah dengan total 9 (sembilan) program prioritas dan sejumlah 51 (lima puluh satu) kegiatan pada Rencana Strategis yang terintegrasi dengan RAD-PPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengundang Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Surat Undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B-2624/10-16/04/2017 Tanggal 26 April 2017 tentang Pemetaan dan Penyusunan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selanjutnya menetapkan usulan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 027/205/PBJ/V/2017 yang ditetapkan tanggal 19 Mei 2017 oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Berdasarkan surat Inspektorat Daerah Nomor 700/803/Inspektorat/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Perkembangan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi maka dengan ini telah disusun laporan yang dibutuhkan dan sekiranya dapat memperjelas perkembangan upaya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang mengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Tahun 2018, dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa kedepannya. Demikian laporan ini kami susun agar dapat digunakan semestinya demi tercapainya transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.

Sendawar, 27 September 2017

PLH. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala Sub-Bagian Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah

**AMI PARAMBAN, S.T**

NIP. 19780831 200502 1 002

=

---

# DAFTAR ISI

---

Aksi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa B09—2017

Uraian	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Program Prioritas	1
Tabel Capaian Program Prioritas	2
Daftar Rencana Aksi yang Belum Terealisasi	3
Kesimpulan	4
Lampiran	

---

# DAFTAR PROGRAM PRIORITAS

---

Aksi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa B09—2017

## A. Rekomendasi :

1. Meningkatkan Maturitas dengan salah satu fokus pada independensi SDM yang menjadi kelompok kerja pemilihan
2. Mengintegrasikan kegiatan upload SiRUP dalam kegiatan penyusunan Pra-RKA dan perbaikannya saat DPA disahkan
3. Peningkatan standar dan penguatan kelembagaan LPSE
4. Sub-Bagian Layanan Pengadaan mengupayakan sertifikat LPSE:2014

## B. Rencana Aksi

1. Meningkatkan maturitas ULP menjadi Level 3
2. Pemanfaatan SiRUP dalam penyusunan RKA
3. Diterapkannya Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Meningkatkan kelembagaan LPSE Permanen dan upaya kepemilikan standarisasi LPSE:2014

## C. Ukuran Keberhasilan

1. Meningkatnya Capaian Maturitas ULP semula awal tahun anggaran 2016 berada pada level 1
2. Ditayangkannya RUP pada tahun anggaran berikutnya pada Triwulan akhir tahun anggaran sebelumnya (T-1) .
3. Peraturan Bupati tentang uraian tugas yang mencakup Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4. Permanen nya LPSE dan kepemilikan Standar LPSE:2014

## D. Target Capaian 2017

1. Meningkatnya maturitas ULP menjadi Level 2
2. Kesesuaian SiRUP 2018 dengan postur anggaran APBD 2018
3. Terbentuknya fungsi UKPBJ pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku pengelola ULP, LPSE, dan LPP PBJ pada tiap-tiap sub-bagian dalam Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4. Peralihan sarana prasarana LPSE untuk tahun 2018 ke Sub-Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan upaya kepemilikan pembaharuan SLA dan LPSE:2014

# TABEL CAPAIAN PRIORITAS

## Aksi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa B09—2017

No	Rencana Aksi	Target B8 (September)	Realisasi Bulan September	Keterangan
1	Meningkatkan Maturitas menjadi Level 2	Level 2	Level 2	<p>Terdaftar di LKPP dan dapat diakses secara online melalui : <a href="https://siulp.lkpp.go.id/summary-report/458">https://siulp.lkpp.go.id/summary-report/458</a></p> <p>Pokja penuh waktu yang sudah mendaftar mutase ke Bagian PBJ adalah sebanyak 1 (satu) orang dan 1 orang PNS baru lulus sertifikasi tingkat dasar, keseluruhan PNS Pokja permanen untuk tahun 2018 bertambah dari 2 orang menjadi 4 orang.</p>
2	Pemanfaatan SiRUP dalam penyusunan RKA	Belum dapat dilaksanakan	Belum terlaksana	Aplikasi SiRUP masih belum dapat menginput jenis pekerjaan dalam bentuk Swakelola dan Penyedia dalam Swakelola
3	Peraturan Bupati tentang uraian tugas yang mencakup Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Terbit Peraturan Bupati tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Telah terbit Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2017 yang menjabarkan tugas jabatan struktural Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Peraturan Bupati tentang UKPBJ yang mempermanenkan ULP dan LPSE secara structural belum dapat dibentuk Karena Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang semula jadwal akan diterbitkan pada tahun 2017 belum terbit hingga laporan ini dibuat, sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang UKPBJ yang merupakan revisi Permendagri 99/2014 belum juga dapat diterbitkan sehingga tidak ada dasar hukum untuk pembentukan Peraturan Bupati tentang UKPBJ yang konsepnya sudah disosialisasikan oleh LKPP
4	Permanen LPSE dan kepemilikan Standar LPSE:2014	Telah terbit Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2017 yang menjabarkan tugas jabatan struktural Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Telah teranggarkan anggaran APBDP 2017 untuk melaksanakan perpindahan LPSE dari kepanitiaian ( <i>ad-hoc</i> ) ke Sub-Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (permanen)	Telah dikirim staf Sub-Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai admin PPE sebanyak 1 (satu) orang, kebutuhan SDM lainnya dengan pelatihan pada LKPP akan dilaksanakan pada Bulan November 2017



---

# KESIMPULAN

---

## Aksi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa B09—2017

Dari 4 (empat) Rencana Aksi terkait transparansi pengadaan barang dan jasa, telah terdapat 2 (dua) ukuran keberhasilan yang sudah terpenuhi, terdapat 1 (satu) yang sudah teranggarkan pada APBD-Perubahan 2017, dan terdapat 1 (satu) rencana aksi yang belum terlaksana sama sekali dikarenakan aplikasi SiRUP dari LKPP masih mengalami gangguan, dokumen pendukung laporan terlampir sebagai bahan pelengkap pendukung informasi, demikian informasi ini disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sendawar, 27 September 2017

PLH. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  
Kepala Sub-Bagian Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah

**AMI PARAMBAN, S.T**

NIP. 19780831 200502 1 002

# LAMPIRAN

Aksi Transparansi dan Akuntabilitas  
Dalam Mekanisme Pengadaan Barang  
dan Jasa B09—2017